

Analisis pengaruh alokasi dana pembinaan terhadap daya saing komoditi unggulan daerah (studi kasus UMKM petani Kemiri Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatra Utara)

Toharuddin Harahap; Hefrizal Handra; Efa Yonnedi

Prodi Pendidikan Ekonomi Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

**E-mail korespondensi: toharharahap753@gmail.com*

Abstract

This research aims to understand analysis of the influence of the allocation of development funds on the competitiveness of regional superior commodities (case study of SMEs of candlenut farmers, North Padang Lawas Regency, North Sumatra Province). This study used a qualitative descriptive method. The data used are secondary data obtained through the website of the Directorate General of Fiscal Balance www.djpk.kemenkeu.go.id/ and the Central Statistics Agency for the North Padang Lawas Regency. The results of the study have a partial effect on predicting the analysis of the influence of the allocation of coaching funds (Case Study of Kemiri Small Medium Enterprises, North Padang Lawas Regency, North Sumatra Province). While the results of the study have a partial effect on predicting the competitiveness of regional superior commodities (Case Study of Kemiri Pecan Farmers, North Padang Lawas Regency, North Sumatra Province).

Keywords: *development fund allocation, competitiveness of regional leading commodities*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan guna memahami analisis pengaruh alokasi dana pembinaan terhadap daya saing komoditi unggulan daerah (studi Kasus UMKM petani kemiri kabupaten padang lawas utara provinsi sumatra utara). Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif. Data yang dipakai yakni data sekunder yang didapat melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id/ dan Badan Pusat Statistik kabupaten padang lawas utara. Hasil penelitian berpengaruh secara parsial dalam memprediksi analisis pengaruh alokasi dana pembinaan (Studi Kasus UMKM Petani Kemiri Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatra Utara). Sedangkan hasil penelitian berpengaruh secara parsial dalam memprediksi daya saing komoditi unggulan daerah (Studi Kasus UMKM Petani Kemiri Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatra Utara).

Kata kunci: alokasi dana pembinaan, daya saing komoditi unggulan daerah

PENDAHULUAN

Vitalitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dan sangat penting dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, karena UMKM dapat bekerja di luar paradigma dominan, dan lebih sensitif terhadap peluang teknologi atau komersial, mereka mampu menghasilkan inovasi radikal (OECD, 2017). Dengan demikian, UMKM

memainkan peran penting dalam perekonomian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menghasilkan lingkungan yang sehat untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Terlepas dari manfaat yang dibawa oleh UMKM, kesulitan pembiayaan UMKM telah lama menjadi fenomena di seluruh dunia. Indikator umum untuk mengukur tingkat kesulitan pembiayaan adalah tingkat kesenjangan keuangan yang dihadapi oleh UMKM, yang merupakan kekurangan pasokan keuangan formal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM. *The International Finance Corporation* (2018) mengkaji kendala kredit untuk UMKM di 128 negara, dan menemukan 40% UMKM dalam sampel menghadapi kesulitan pembiayaan dengan kesenjangan keuangan sebesar \$5,2 triliun setiap tahun yang merupakan 1,4 kali dari ukuran pinjaman UMKM saat ini.

Sementara banyak literatur yang ada menganalisis kesenjangan keuangan UMKM melalui karakteristik UMKM dan berbagai struktur ekonomi, sangat sedikit penelitian yang berfokus pada penyebab dan mekanisme di balik faktor-faktor penentu yang menyebabkan kesulitan pembiayaan UMKM. Makalah ini mengisi kekosongan dan mengusulkan bahwa penerapan strategi yang menentang keunggulan komparatif adalah salah satu faktor fundamental utama yang menghasilkan heterogenitas kesenjangan keuangan UMKM.



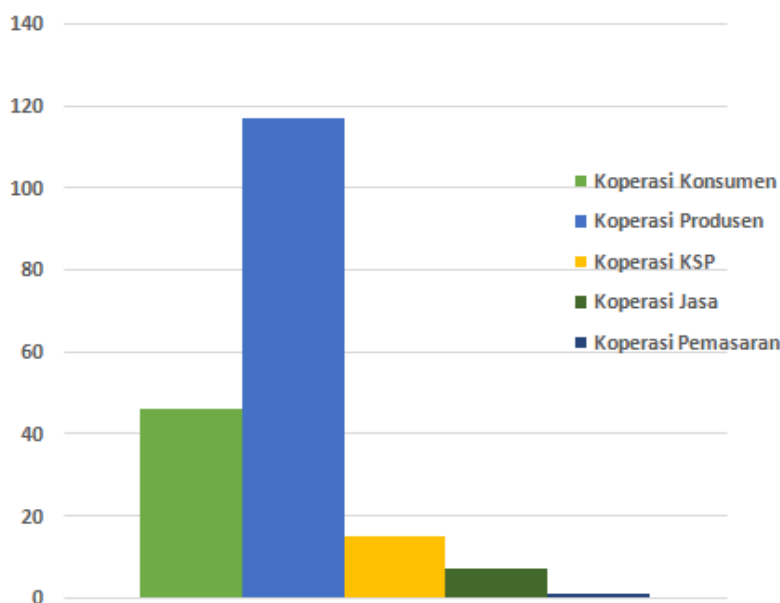
Sumber: BPS Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gambar 1. Peta Kabupaten Padang Lawas Utara.

Padang Lawas Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Utara atau lebih sering disingkat dengan "PALUTA", Indonesia. Padang Lawas Utara merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007, tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Ibukota kabupaten ini adalah Gunung Tua. Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan daerah dengan ketinggian rata-rata 1.915 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 1°13'50"-2°2'32" Lintang Utara,

serta 99°20'44"- 100°19'10 Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah berupa daratan seluas 3.918,05 km². Kabupaten Padang Lawas Utara terdiri dari 12 wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Bapak Andar Amin Harahap yang sampai sekarang masih menjabat sebagai bupati. Luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu Batang Onang (485,00 km²), Padang Bolak Julu (196,44 km²), Portibi (246,13 km²), Padang Bolak (699,06 km²), Padang Bolak Tenggara (94,93 km²), Simangambat (429,42 km²), Ujung Batu (269,62 km²), Halongonan (410,27 km²), Halongonan Timur (181,33 km²), Dolok (525,27 km²), Dolok Sigompulon (262,56 km²) dan Hulu Sihapas (39,05 km²). Dari 12 kecamatan yang ada didaerah kabupaten padang lawas utara memiliki geografis batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kabupaten labuhan batu & Labura, sebelah timur berbatasan dengan provinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten padang lawas dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten tapanuli selatan. Sedangkan rata-rata curah hujannya 161,56 mm. Peta Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditunjukkan pada Gambar 1.

Berdasarkan Gambar 2 banyaknya koperasi menurut jenis koperasi di kabupaten padang lawas Utara pada tahun 2021 yaitu koperasi konsumen sebanyak 40, dan koperasi produsen sangat didominasi sehingga mencapai 120, kemudian koperasi KSP untuk tahun 2021 lagi terjadi penurunan kurang lebih 20, dan koperasi jasa pada tahun 2021 terjadi lagi penurunan yang sangat derastis lagi dibandingkan dengan koperasi KSP sedangkan koperasi pemasaran pada tahun 2021 tidak ada yang meminati jenis koperasi tersebut.



Sumber: BPS Padang Lawas Utara, 2022 (diolah)

Gambar 2. Banyaknya koperasi menurut jenis koperasi di Kabupaten Padang Lawas Utara

Dari Tabel 1 menunjukkan banyaknya perusahaan menurut kecamatan dan bentuk badan hukum usaha dikabupaten padang lawas utara tahun 2021 mulai dari perseroan terbatas (PT) sebanyak 25 dan comanditer *venotschaap* (CV) bentuk badan hukumnya sebanyak 10 dan selanjutnya firma (Fa) bentuk badan hukumnya ditahun 2021 tidak ada yang mendominasi atau nol, dimana bentuk badan hukum koperasi pada tahun 2021 di padang lawas utara sama dengan (Fa) sebesar nol, sedang perusahaan perseorangan

mendapat 1 dan BUL memperoleh nol.

Tabel 1. Banyaknya Perusahaan Menurut Kecamatan dan Bentuk Badan Hukum Usaha di Kabupaten Padang Lawas Utara, 2021

N

Kecamatan Subdistrict (1)	Bentuk Badan Hukum Form of Business Law Board						Jumlah Total (8)
	PT (2)	CV (3)	Fa (4)	Koperasi (5)	PO (6)	BUL (7)	
10 Batang Onang	0	0	0	0	0	0	0
20 Padang Bolak Julu	0	0	0	0	0	0	0
30 Portibi	0	4	0	0	0	0	4
40 Padang Bolak	10	4	0	0	1	0	15
41 Padang Bolak Tenggara	0	1	0	0	0	0	1
50 Simangambat	0	0	0	0	0	0	0
51 Ujung Batu	0	0	0	0	0	0	0
60 Halongonan	7	0	0	0	0	0	7
61 Halongonan Timur	4	0	0	0	0	0	4
70 Dolok	0	0	0	0	0	0	0
80 Dolok Sigompulon	4	1	0	0	0	0	5
90 Hulu Sihapas	0	0	0	0	0	0	0
Padang Lawas Utara 2021	25	10	0	0	1	0	36
2020	45	73	0	0	126	42	285
2019	28	36	0	6	211	61	342
2018	14	27	3	0	135	0	179
2017	16	33	0	5	106	0	160
2016	15	26	0	2	163	0	203
2015	11	42	0	5	149	0	207

Sumber: BPS Padang Lawas Utara, 2022 (diolah)

Dari Tabel 2 dapat dilihat banyaknya perusahaan menurut bentuk badan hukum usaha di kabupaten padang lawas utara mulai tahun 2016-2021 terletak pada perusahaan terbatas (PT), kemudian badan hukum perusahaan perorangan (PO) mempunyai peringkat kedua mulai dari tahun 2016-2021 yang mempunyai bentuk badan hukum di daerah kabupaten padang lawas utara.

Tabel 2. Banyaknya perusahaan menurut bentuk badan hukum usaha di Kabupaten Padang Lawas Utara, 2016-2021

Badan Hukum Business Law Board (2)	2016 (3)	2017 (4)	2018 (5)	2019 (6)	2020 (7)	2021 (8)
Perusahaan Terbatas (PT) Trading Company	15	16	14	28	45	25
Persekutuan Comanditer (CV) Commanditer Venoshap	26	33	27	36	73	10
Persekutuan Firma (Fa) Firm	0	0	3	0	0	0
Koperasi Cooperative	2	5	0	6	0	0
Perusahaan Perorangan (PO) Individual Company	147	106	135	211	126	1
Badan Usaha Lainnya Other Company	0	0	0	61	42	0

Sumber: BPS Padang Lawas Utara, 2022 (diolah)

Dari Tabel 3 dapat kita lihat bahwa jumlah penerbitan SIUP menurut bentuk perusahaan di kabupaten padang lawas utara ditahun 2021 jumlah yang sudah terbit sebanyak 10 sehingga ditahun inilah yang paling rendah dari enam bentuk perusahaan, kemudian bentuk perusahaan yang paling banyak terbit pada tahun 2015 sebanyak 198

yang sudah terbit.

Tabel 3. Jumlah penerbitan SIUP menurut bentuk perusahaan di Kabupaten Padang Lawas Utara, 2021

No (1)	Bentuk Perusahaan Type Establishment (2)	Jumlah Sudah Terbit Number of Published (3)
1	Perusahaan Terbatas (PT) <i>Trading Company</i>	2
2	Persekutuan Comanditer (CV) <i>Commanditer Venoshop</i>	1
3	Persekutuan Firma (Fa) <i>Firm</i>	0
4	Koperasi <i>Cooperative</i>	0
5	Perusahaan Perorangan (PO) <i>Individual Company</i>	7
6	Badan Usaha Lainnya <i>Other Company</i>	0
2021		10
2020		37
2019		25
2018		157
2017		137
2016		190
2015		198

Sumber: BPS Padang Lawas Utara, 2022 (diolah)

Dari Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa pembiayaan daerah sudah termasuk disitu UMKM sangatlah berpariasi, apalagi kita lihat mulai dari tahun 2018 akan mencapai dana direalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1.063.266.609.625,- dan belanja daerah yang di peroleh Rp 1.081.855.421.645,- sedangkan yang dialokasikan dana pembinaan UMKM sebesar Rp 38.032.273.030,.

Tabel 4. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD), dana belanja daerah beserta pembiayaan daerah UMKM

No	Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pembiayaan Daerah UMKM
1	Realisasi APBD 2022	1.149.206.581.378	1.116.550.581.113	64.274.410.677
2	Realisasi APBD 2021	1.149.206.581.378	1.116.550.581.113	64.274.410.677
3	Realisasi APBD 2020	1.123.342.612.050,01	1.082.375.067.023,80	23.860.569.747,59
4	Realisasi APBD 2019	1.198.289.989.291	1.190.735.750.560	16.572.099.964
5	Realisasi APBD 2018	1.063.266.609.625	1.081.855.421.645	38.032.273.030

Sumber: BPS Padang Lawas Utara, 2022 (diolah)

Selanjutnya tahun 2019 akan mencapai dana direalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1.198.289.989.291, dan belanja daerah yang di peroleh Rp 1.190.735.750.560 sedangkan yang dialokasikan dana pembinaan UMKM sebesar Rp 16.572.099.964. Sedangkan tahun 2020 akan mencapai dana direalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1.123.342.612.050,01 dan belanja daerah yang di peroleh Rp

1.082.375.067.023,80 sedangkan yang dialokasikan dana pembinaan UMKM sebesar Rp 23.860.569.747,59 selanjutnya tahun 2021 akan mencapai dana direalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1.149.206.581.378 dan belanja daerah yang di peroleh Rp 1.116.550.581.113 sedangkan yang dialokasikan dana pembinaan UMKM sebesar Rp 64.274.410.677 , dan tahun 2022 akan mencapai dana direalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 1.149.206.581.378 dan belanja daerah yang di peroleh Rp 1.116.550.581.113 sedangkan yang dialokasikan dana pembinaan UMKM sebesar Rp 64.274.410.677 .

METODE

Tempat penelitian yang di laksanakan di kabupaten padang lawas utara Provinsi Sumatera Utara. Dimana disini yang akan di teliti tidak lain lagi daya saing komoditi unggulan daerah studi kasus UMKM petani kemiri. Sehingga ada beberapa cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Untuk itu harus diketahui dulu Metode adalah bagaimana prosedur yang dilakukan oleh seorang pengambil data dalam tatacaranya sampai hingga selesesai sesuai dengan kenyataannya. Achmadi berpendapat dalam penelitian ini (2008:1) bahwa “proses dalam suatu penelitian dimana disitu melihat data yang kita peroleh kemudian merangkaikan kalimatnya sampai dengan tahap pengolahan data agar memperoleh hasil sesuai dengan yang dirumuskan. Metode penelitian merupakan suatu cara pilihan yang dilakukan oleh sipeneliti dalam penelitian dimana penelitian tersebut yang memudahkannya dalam menyelesaikannya, selanjutnya Nana (2012:52) berpendapat bahwa “metode penelitian adalah cara yang singkat menerut yang dilakukan oleh sipeneliti agar dapat menyelesaikan penelitiannya sesuai dengan sumber-sumber yang diperoleh pada kenyataannya”.

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan suatu metode yang dipakai oleh seorang peneliti untuk merumuskan penelitiannya, sehingga peneliti dapat merumuskan penelitiannya sesuai dengan apa yang ditujukan yaitu pada penelitian saya ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan data yang diperoleh dalam suatu penelitian ini namanya data skunder dengan sumber datanya yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Inovasi keberlanjutan

Konsep inovasi keberlanjutan beragam dalam literatur saat ini (Hermundsdottir et al., 2021). Dalam studi sebelumnya seperti Clark et al. (2007), secara luas didefinisikan bahwa “inovasi berkelanjutan adalah proses” yang menggabungkan nilai-nilai lingkungan, sosial, dan ekonomi ke dalam sistem perusahaan. Dari tahap pengembangan konsep, “riset dan pengembangan”, dan “komersialisasi” (Kibler et al. 2018). “Proses ini berlaku untuk produk, layanan, dan teknologi, serta untuk bisnis baru dan model organisasi ”(hal. 99). Berdasarkan Arcese dkk. (2015), inovasi keberlanjutan dianggap sebagai perubahan yang lebih baik yang meningkatkan kinerja keberlanjutan perusahaan.

Selain itu, inovasi keberlanjutan didekati dari dua pandangan yang bertentangan, yaitu tradisional dan revisionis (Hermundsdottir et al., 2021), yang menyebabkan heterogenitas dalam sastra saat ini. Pandangan tradisional berpendapat bahwa inovasi keberlanjutan tidak mengarah pada manfaat yang dihasilkan bagi perusahaan tetapi lingkungan saja. Kemudian, inovasi keberlanjutan membutuhkan investasi awal, pengembalian yang lama, dan mengarah pada peningkatan biaya, kenaikan harga, dan penurunan daya saing perusahaan (Kuzma et al., 2020; Rauter dkk., 2019). Sebaliknya, pandangan revisionis menyangkal gagasan ini dan menyarankan bahwa inovasi keberlanjutan mengarah pada peningkatan daya saing dalam banyak hal yang meningkatkan dimensi kinerja perusahaan (Gürlek et al., 2018; Hojnik et al., 2017;

García Sánchez et al., 2019; Ikram et al., 2020).

Tantangan pemasaran

Menurut Stephens (2020) dan Malinao (2021), dominasi laki-laki lebih terlihat untuk menguasai pasar, saluran pemasaran, dan norma budaya di negara berkembang. Penulis tetap fokus pada pengusaha perempuan perkotaan dan pedesaan. Mereka mempelajari faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi perempuan lulusan bisnis dalam berwirausaha, dan menyimpulkan bahwa tantangan pemasaran merupakan faktor yang signifikan bagi pengusaha perempuan. Studi lain menyimpulkan bahwa karena masyarakat berkembang dan masyarakat Muslim didominasi oleh laki-laki, perempuan dibatasi untuk memasuki setiap bisnis. Mereka juga menghadapi tantangan pemasaran (Hussain et al., 2021). Laki-laki tidak memberikan ruang bagi mereka, dan perempuan tidak memiliki akses ke saluran pemasaran tradisional dan terbaru, terutama di daerah pedesaan (Peterson, 2020). Mereka bekerja dari rumah dan tidak dapat mempercepat dan memperluas bisnis mereka karena kurangnya sumber daya dan perilaku tidak mendukung dari anggota keluarga laki-laki mereka (Obisesan & Olayide, 2021). Pengusaha wanita tidak dapat mengiklankan produk mereka; oleh karena itu, mereka terbatas pada pasar tertentu di sekitar mereka (Islam et al., 2021; Kumar & Shukla, 2019). Oleh karena itu, setelah beberapa tahun, bisnis mereka tidak berkembang, dan mereka masih bergantung secara finansial pada anggota keluarga laki-laki mereka (Piva & Rovelli, 2021; Poggi & Antiaye, 2020).

Tantangan budaya

Aktivitas rumah tangga dan tanggung jawab di rumah (memasak, mencuci, membersihkan, dan membesarkan anak) membatasi perempuan untuk menjaga keseimbangan ideal antara tugas rumah & pekerjaan (Basit et al., 2020; Burbar & Shukani, 2021). Mereka berprestasi lebih rendah karena tidak memanfaatkan waktu yang dibutuhkan dalam bisnis (Erogul & Na, 2021; Turnbull et al., 2020). Kendala paling signifikan yang diidentifikasi oleh penulis adalah (i) perempuan tidak diperbolehkan bekerja karena batasan budaya dan (ii) kurangnya fasilitas pemasaran (Uddin, 2021; Echchabi et al., 2020). Hambatan signifikan terhadap pertumbuhan UKM adalah keputusan keluarga seperti pengasuhan anak dan tingkat kelahiran (Malinao, 2021; Hamid, 2020). Negara berkembang memiliki budaya dan lingkungan yang berbeda, dan masalah perempuan Asia Selatan berbeda dari negara berkembang lainnya; Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus difokuskan pada pengusaha perempuan yang tergabung dalam negara-negara Asia Selatan (Malinao, 2021). Studi ini mengidentifikasi bahwa pertemuan bisnis gratis dengan laki-laki merupakan hambatan signifikan bagi perempuan Muslim yang membatasi perempuan untuk menjadi pengusaha.

Alokasi dana pembinaan daerah (studi kasus UMKM petani kemiri Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara)

Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin, dalam mengalokasikan dananya pihak perbankan harus dapat memilih dari berbagai alternatif yang ada. Ada pun indikator yang ditetapkan pada alokasi dana seperti dibawah ini:

Pendapatan asli daerah

Menurut Mardiasmo (2002) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Belanja daerah

Belanja Daerah Sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten / kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintahdaerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: 1).Pendidikan, 2).Kesehatan. 3).Pekerjaan umum. 4).Perumahan rakyat. 5).Penataan ruang. 6).Perencanaan pembangunan. 7).Perhubungan, 8).Lingkungan hidup. 9).Pertanahan. 10).Kependudukan dan catatan sipil. 11).Pemberdayaan perempuan. 12).Keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 13). Sosial, 14). Tenaga kerja, 15). Koperasi dan usaha kecil dan menengah, 16). Penanaman modal, 17). Kebudayaan, 18). Pemuda dan olah raga, 19). Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, 20). Pemerintahan umum, 21). Kepegawaian, 22). Pemberdayaan masyarakat dan desa, 23. Statistik, 24). Arsip, 25). Komunikasi dan informatika, 26).Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup, 27).Pertanian, 28).Kehutanan, 29).Energi dan sumber daya mineral, 30).Pariwisata, 31).Kelautan dan perikanan, 32).Perdagangan, 33).Perindustrian. 34).Transmigrasi.

Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang – undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri atas: 1).Pelayanan umum, 2).Ketertiban dan ketemtraman, 3).Ekonomi. 4).Lingkungan hidup, 5).Perumahan dan fasilitas umum. 6).Kesehatan, 7).Pariwisata dan budaya, 8).Pendidikan, 9).Perlindungan sosial.

Pembiayaan daerah UMKM

Pembiayaan Usaha Kecil Menengan (UKM) adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam satu siklus usaha. Pembiayaan ini di peruntukkan untuk usaha pada sektor rill, seperti: Perdagangan, Galian C, Pabrik, Kontraktor,dan lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Banyaknya Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2021 data yang di proleh dari data BPS koperasi produsen sangat didominasi sehingga mencapai 120. Banyaknya Perusahaan Menurut Kecamatan dan Bentuk Badan Hukum Usaha di Kabupaten Padang Lawas Utara, tahun 2021 dimana bentuk badan hukum koperasi pada tahun 2021 di padang lawas utara sama dengan (Fa) sebesar nol, sedang perusahaan perseorangan mendapat 1 dan BUL memperoleh nol. Banyaknya Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum Usaha di Kabupaten Padang Lawas Utara, 2016-2021 terletak pada perusahaan terbatas (PT), kemudian badan hukum perusahaan

perorangan (PO) mempunyai peringkat kedua mulai dari tahun 2016-2021 yang mempunyai bentuk badan hukum di daerah kabupaten padang lawas utara. Bahwa jumlah penerbitan SIUP menurut bentuk perusahaan di kabupaten padang lawas utara ditahun 2021 jumlah yang sudah terbit sebanyak 10 sehingga ditahun inilah yang paling rendah dari enam bentuk perusahaan, kemudian bentuk perusahaan yang paling banyak terbit pada tahun 2015 sebanyak 198 yang sudah terbit. Sedangkan dana terbesar di yang dialokasikan mulai dana pembinaan UMKM sebesar Rp **64.274.410.677,-** yaitu ditahun 2021 dan tahun 2022 sedangkan dialokasikan dana pembinaan UMKM yang paling rendah yaitu ditahun 2019 sebesar Rp **16.572.099.964,-**.

Saran

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan peningkatan daya saing komoditi kemiri yang studi kasusnya di kabupaten padang lawas utara. Sehingga pemerintah daerah tersebut dapat juga mengalokasikan dana tersebut terhadap masyarakat sehingga ini merupakan mengembangkan suatu produk dengan meningkatkan ekonomi rakyat padang lawas utara. Disamping itu dengan melakukan pengembangan produk kemiri dapat juga juga mengembangkan daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, (2008). *Metode penelitian*. UNP: Padang.
- Arcese, G., Flammini, S., Lucchetti, MC, Martucci, O. (2015). Bukti dan pengalaman praktik inovasi keberlanjutan terbuka di sektor makanan. *Sustain* 7, 8067– 8090. doi:10.3390/su7078067.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara. (2022). Data SIUP dan data banyaknya perusahaan, www.bps.go.id, Diakses Tanggal 1 Januari 2021.
- Basit, A., Hassan, Z., & Sethumadhavan, S. (2020). Keberhasilan wirausaha: tantangan utama yang dihadapi pengusaha wanita Malaysia di Abad 21. *Jurnal Internasional Bisnis dan Manajemen*, 15 (9), 122-138. <https://doi.org/10.5539/ijbm.v15n9p122>.
- Clark, T., Piagam, M., (2007). Inovasi berkelanjutan: kesimpulan kunci dari konferensi inovasi berkelanjutan 2003-2006 yang diselenggarakan oleh pusat desain berkelanjutan.
- Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id/
- Echchabi, A., Omar, MMS, & Ayedh, AM (2020). Niat wirausaha di kalangan mahasiswi di Oman. *Jurnal Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Internasional*, 12 (4), 280–297. <https://doi.org/10.1504/jibed.2020.110251>
- Erogul, MS, & Na, H. (2021). Sebuah tinjauan global keuangan kewirausahaan perempuan. *Internasional Jurnal Globalisasi dan Usaha Kecil*, 12 (1), 59-82. <https://doi.org/10.1504/ijgsb.2021.10036479>
- Gürlek, M., Tuna, M., (2018). Memperkuat keunggulan kompetitif melalui budaya organisasi hijau dan inovasi hijau. *melayani Ind.J.38* (7–8), 467–491. doi:10.1080/02642069.2017.1402889.
- Hermundsottir, F., Aspelund, A., (2021). Inovasi keberlanjutan dan daya saing perusahaan: ulasan. *J Clean Prod* 280, Volume 1, 124715 ISSN 0959-6526.
- _____ (2021). Inovasi keberlanjutan dan daya saing perusahaan: ulasan. *J Clean Prod* 280 Volume 1, 124715 ISSN 0959-6526.
- <http://e-journal.uajy.ac.id/3432/3/2EA14629.pdf>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200830/9/1284774/mantap-umkm-dapat-alokasi-dana-pen-terbesar-kedua>
- <https://www.google.com/search?q=alokasi+dana+adalah&oq=alokasi+dana+adalah&aqs=chrome..69j0j70j85l67j90j91j92j93j94j95j96j97j98j99&sourceid=chrome>

- &ie=UTF-8
<https://www.google.com/search?q=pembiayaan+daerah+umkm+adalah&oq=pembiayaan+daerah+umkm+adalah&aqs=chrome..69i57j33i22i29i30.14046j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
- Hussain, T., Rehman, MZU, & Abbas, S. (2021). Peran pengetahuan kewirausahaan dan sikap pribadi dalam mengembangkan niat kewirausahaan pada lulusan bisnis: kasus Pakistan. *Jurnal Penelitian Kewirausahaan Global*. <https://doi.org/10.1007/s40497-021-00283-0>.
- IFC (International Finance Corporation), (2018). Kesenjangan Keuangan UMKM: Penilaian Kekurangan dan Peluang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Pasar Berkembang. IFC, Washington, DC.
- Ikram, M., Sroufe, R., Mohsin, M., Solangi, YA, Shah, SZA, Shahzad, F., (2019a). Apakah CSR mempengaruhi kinerja perusahaan? Kajian longitudinal sektor UKM di Pakistan. *J. Bola. bertanggung jawab*. 11, 27–53. doi:10.1108/JGR-12-2018-0088.
- Ikram, M., Zhang, Q., Sroufe, R., Ferasso, M., (2020). Dimensi sosial keberlanjutan tingkat perusahaan: kerangka kerja integratif termasuk wawasan COVID-19. *Keberlanjutan* 12, 8747. doi:10.3390/su12208747.
- Ikram, M., Zhang, Q., Sroufe, R., Ferasso, M., (2021). Kontribusi lembaga sertifikasi dan standar keberlanjutan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan: pendekatan sistem abu-abu terintegrasi. *Mempertahankan. Melecut. Konsumsi*. 28, 326–345. doi:10.1016/j.spc.
- Ikram, M., Zhou, P., Shah, SAAAA, Liu, GQQ, (2019b). Apakah sistem pengelolaan lingkungan membantu meningkatkan pembangunan berkelanjutan perusahaan? Bukti dari perusahaan manufaktur di Pakistan. *J. Bersih. Melecut*. 226, 628–641. doi:10.1016/j.jclepro.2019.03.265.
- Islam, N., Aziz, N., Mustafi, MAA, & Bapi, AB (2021). Sebuah Perspektif Psikologis niat Wirausaha di antara Lulusan Bisnis Universitas Swasta di Bangladesh. *Jurnal Manajemen Internasional*, 11 (12). <https://doi.org/10.34218/ijm.11.12.2020.252>
- Kuzma, E., Padilha, LS, Sehnem, S., Julkovski, DJ, Roman, DJ, (2020). Hubungan antara inovasi dan keberlanjutan: studi meta-analitik. *J. Bersih*.
- Malinao, CW (2021). Apakah orang-orang di Ifugao Filipina Kewirausahaan? Menjelaskan Karakteristik Kewirausahaan, Motivasi, Tantangan, dan Niat di antara Ifugao. *Jurnal Internasional Kewirausahaan, Bisnis dan Kreatif*, 1 (2), 45-53. <https://doi.org/10.31098/ijebce.v1i2.517>
- OECD, (2017). Organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi. Meningkatkan Kontribusi UKM dalam Ekonomi Global dan Digitalisasi”.
- Peterson, M. (2020). Pemodelan aktivitas kewirausahaan negara untuk menginformasikan kewirausahaan penelitian pemasaran. *Jurnal Penelitian Bisnis*, 113, 105-116. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.11.042>
- Piva, E., & Rovelli, P. (2021). Pikirkan kesenjangan gender: dampak pendidikan universitas pada masuknya wirausaha lulusan STEM perempuan dan laki-laki. *Ekonomi Usaha Kecil*, 59, 143-161. <https://doi.org/10.1007/s11187-021-00525-1>.
- Stephens, S. (2020). Pendidikan tinggi dan kegiatan kewirausahaan: pengalaman lulusan. *Jurnal Internasional Ekonomi dan Pembangunan Pendidikan*, 11 (4), 407. <https://doi.org/10.1504/ijeed.2020.10030595>.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B*. Alfabeta: Bandung.